

## Analisis Kebijakan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) di Indonesia dengan CIPP

**Dedy Yusuf Aditya**

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI

Korespondensi penulis: [yusufadit42@yahoo.co.id](mailto:yusufadit42@yahoo.co.id)

**Gita Kencanawaty**

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Indraprasta PGRI

Email: [gitanianiawaty@gmail.com](mailto:gitanianiawaty@gmail.com)

Alamat: Jln. Nangka No. 58C Tanjung Barat (TB. Simatupang), Jagaraksa, Jakarta Selatan

**Abstract.** Education plays a central role in nation-building, with Vocational High Schools (SMK) in Indonesia holding a crucial role in providing skilled workforce. This article analyzes the policy of the Center of Excellence Vocational High School Program (SMK PK) using the Context, Input, Process, Product (CIPP) approach and a qualitative research method through library research analysis. The evaluation is based on legal foundations, objectives, curriculum implementation, resources, learning processes, and the impact of the SMK PK program. Context analysis reveals a strong legal foundation, yet improvement is needed in socialization and training. Input evaluation appreciates an industry-aligned curriculum design, although challenges persist in human resources and infrastructure. The curriculum implementation process shows progress, but coordination and synchronization need enhancement. Overall, the SMK PK program has a positive impact, improving graduate quality and fostering synergy between SMK, industry, and government. Challenges such as assistance focus, job market mismatch, and a lack of productive subject teachers require further attention. In conclusion, a comprehensive evaluation of the SMK PK program provides a complex overview, highlighting the potential to enhance vocational education quality in Indonesia.

**Keywords:** Policy Evaluation, CIPP, Center of Excellence Vocational High School

**Abstrak.** Abstrak. Pendidikan memegang peran penting dalam pembangunan suatu bangsa, dan di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki peran krusial dalam menyediakan tenaga kerja terampil. Artikel ini menganalisis kebijakan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) dengan menggunakan pendekatan Context, Input, Process, Product (CIPP) dan metode penelitian kualitatif melalui teknik analisis studi kepustakaan (Library Research). Evaluasi dilakukan berdasarkan landasan hukum, tujuan, implementasi kurikulum, sumber daya, proses pembelajaran, dan dampak dari program SMK PK. Metode studi kepustakaan digunakan sebagai sumber data dengan merinci literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis konteks menunjukkan dasar hukum yang kuat, namun perlu peningkatan dalam sosialisasi dan pelatihan. Evaluasi input mengapresiasi desain kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, meskipun masih ada kendala dalam sumber daya manusia dan sarana-prasarana. Proses implementasi kurikulum menunjukkan kemajuan, tetapi koordinasi dan sinkronisasi perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, program SMK PK memberikan dampak positif dengan meningkatkan mutu lulusan dan menciptakan sinergi antara SMK, industri, dan pemerintah. Meskipun demikian, tantangan seperti fokus pada bantuan, ketidaksesuaian dengan kebutuhan lapangan kerja, dan kekurangan guru mata pelajaran produktif masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Kesimpulannya, evaluasi menyeluruh program SMK PK memberikan gambaran kompleks, menyoroti potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Evaluasi Kebijakan, CIPP, SMK Pusat Keunggulan

## **LATAR BELAKANG**

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu bangsa, menjadi fondasi bagi kemajuan dan perkembangan masyarakat. Di Indonesia, sistem pendidikan nasional diatur melalui berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah. Salah satu jenjang pendidikan yang turut memegang peranan krusial dalam menyediakan tenaga kerja terampil adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks, pemerintah Indonesia merespon dengan merancang program-program pendidikan yang relevan, termasuk Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK).

Salah satu landasan hukum yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003). Undang-undang ini menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan pendidikan di semua tingkatan, termasuk SMK. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan menjadi langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas SMK agar dapat merespons kebutuhan dunia industri dan pasar kerja.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) menjadi payung hukum bagi penentuan standar kualitas pendidikan SMK di Indonesia. Dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan merupakan kebijakan terkini yang menonjolkan fokus pemerintah dalam menciptakan SMK yang unggul dan relevan dengan perkembangan industri.

Latar belakang kebijakan ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya menciptakan SDM yang handal dan siap kerja melalui pendidikan kejuruan yang berkualitas. Sebagai respons atas dinamika perkembangan masyarakat dan teknologi, SMK PK diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya trampil secara akademis tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Oleh karena itu, analisis kebijakan terhadap Program SMK PK menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan guna memahami sejauh mana implementasi kebijakan ini dapat memenuhi tujuan-tujuan strategis di bidang pendidikan kejuruan. Dalam konteks tersebut, artikel ini akan melakukan analisis mendalam menggunakan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk menyelami dampak dan efektivitas Program SMK PK di Indonesia.

Untuk menjawab tantangan kebutuhan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing di dunia industri baik level nasional maupun internasional, pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makariem mengeluarkan kebijakan baru yakni Merdeka Belajar (Setiawan & Sofyan, 2022). Hal tersebut disampaikan pertama kali pada hari guru 25 November 2019. Beliau menyampaikan bahwasanya guru yang ada di Indonesia sejatinya memiliki tugas yang sangat mulia dan tersulit. Akan tetapi waktu yang dimiliki seorang guru habis hanya untuk mengerjakan tugas administratif tanpa memiliki manfaat yang jelas. Selain masalah administratif, beliau juga menyampaikan bahwa kurikulum sebelumnya yang digunakan juga terlalu kaku, belum bisa mewadahi semua potensi peserta didik, dan menutup peluang dalam mengeksplor minat dalam belajarnya (Purnomo & Triyono, 2018). Maka dari itu penyerdahanan kurikulum ini dinilai efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi covid 19.

Adanya kebijakan baru ini seakan akan menjawab permasalahan yang ditemukan pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 sudah diberlakukan selama 8 tahun sejak pertama kali disampaikan pada tahun 2013. Banyak hal yang ditemukan dalam penerapannya seperti: kesulitan dalam membuat format penilaian pembelajaran (Uran, 2018), kurangnya keaktifan siswa, penilaian atau evaluasi pembelajaran, sumber belajar masih belum ada sarana yang belum memadai (Trisnawati et al., 2019), hasil penilaian autentik yang tidak memenuhi ketentuan kurikulum, guru-guru yang belum memahami konsep pembelajaran kurikulum 2013 (Alinawati, 2014).

Kendala tersebut menyebabkan pembelajaran yang dilakukan masih jauh dari kata berhasil, bahkan diperburuk dengan kondisi pandemi semacam ini dengan pembelajaran dalam jaringannya yang menyebabkan sebagian besar sekolah mengalami kegagalan pembelajaran (Nurkolis & Muhdi, 2020). Kurikulum Merdeka belajar datang dengan berbagai macam pembaharuan antara lain lebih sederhana dan lebih mendalam karena akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik. Dari segi peserta didik mereka akan lebih merdeka karena dibebaskan dalam memilih mata pelajaran yang sesuai minat dan bakatnya, sedangkan dari tenaga pendidik mereka akan mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Terakhir dari sisi sekolah diberikan wewenang untuk mengelola dan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik (Purnomo et al., 2020) Keunggulan lain adalah pembelajaran yang diterapkan ialah pembelajaran berbasis projek sehingga lebih relevan dan interaktif dan memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk bereksplorasi. Dengan demikian

kurikulum merdeka belajar diharapkan mampu menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

## KAJIAN TEORITIS

### Konsep Evaluasi Program

Evaluasi berasal dari kata *evaluation*. Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi *evaluasi* (Arikunto & Jabar, 2008). Menurut Ralph Tyler, evaluasi adalah proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Evaluasi yang dikembangkan oleh Tyler ini atas dasar pemikiran untuk mengevaluasi tingkah laku peserta didik, dimana menurutnya evaluasi tidak lain adalah usaha untuk memeriksa persesuaian antara tujuan pendidikan yang diinginkan dengan hasil belajar yang dicapai (Nafis, 2008).

Berbeda dengan Tyler, menurut Scriven dalam E. Jane Dividson, *Professional evaluation is defined as the systematic determination of quality or value of something*. Menurut Scriven, evaluasi adalah penelitian yang sistematis tentang manfaat beberapa objek. Beberapa yang dapat dievaluasi diantaranya; program, organisasi, kinerja, kebijakan dan sebagainya. Jika dalam model yang dikembangkan oleh Tyler, evaluator terus menerus memperhatikan tujuan, yaitu sejauh mana tujuan tersebut sudah dicapai, maka model yang dikembangkan Scriven evaluator tidak perlu memperhatikan tujuan. Hal yang perlu diperhatikan dalam model *Goal Free Evaluation Model* adalah bagaimana program tersebut berjalan dengan cara mengidentifikasi performance yang terjadi, baik yang bersifat positif maupun negatif. Alasannya, karena evaluator terlalu rinci dalam tiap-tiap tujuan khusus dan kurang memperhatikan seberapa jauh masing-masing *performance* dapat mendukung *final performance* (Scriven dalam E. Jane Dividson, 2005).

Evaluasi menurut James C, Mc. David, dapat dipandang sebagai proses terstruktur yang menghasilkan dan menyintesis informasi untuk mengurangi ketidakpastian bagi para stakeholder tentang suatu program atau kebijakan yang ditetapkan. (Fathansyah, 2019) menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses penilaian dengan menggunakan kriteria atau hasil-hasil yang digunakan (Kristi D. Menix, 2007). Djaali dan Mulyono, menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, kemudian diambil keputusan atas objek yang dievaluasi (Djaali & Puji Mulyono, 2000). Dalam buku *Evaluation, Theory, Model and Application*, Stufflebeam dan Shinkfield menyatakan bahwa: *Evaluation is the systematic process of delineating, obtaining, reporting*

*and applying descriptive and judgmental information about some object's merit, worth, probity, feasibility, significance and or equity* (Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, 2007)

### **Pengertian Evaluasi Program**

(Arikunto & Jabar, 2008), mengatakan bahwa program adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Selanjutnya, (Wirawan, 2011), menyatakan program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagi jenis program.

Pengertian evaluasi program menurut Billings & Haistead dalam (Kristi D. Menix, 2007), menyatakan evaluasi program sebagai suatu konsep adalah proses mempertimbangkan, menginterpretasikan dan selanjutnya membuat penilaian terhadap data-data yang dikumpulkan dari berbagai komponen perencanaan pendidikan Demikian pula, Wirawan mengemukakan bahwa evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisa dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. Menurut (James Mc.David, 2005), bahwa evaluasi program merupakan suatu kombinasi dan variasi atas teori dan praktik yang digunakan secara luas dalam publik, non profit dan dalam sektor organisasi swasta untuk menghasilkan informasi bagi perencanaan, rancangan dan implementasi.

Evaluasi program juga merupakan penilaian dari hasil usaha-usaha untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang digunakan dalam kebijakan dan program. Dalam hal yang sama, (Arikunto & Jabar, 2008), mengatakan bahwa evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya Secara singkat evaluasi program merupakan upaya untuk mengukur ketercapaian program, yaitu mengukur seberapa jauh sebuah kebijakan dapat diimplementasikan.

Selanjutnya, (Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, 2007) mengklasifikasikan pendekatan evaluasi program dalam dua kategori, yaitu a) kategori pertama, pendekatan yang mengembangkan temuan-temuan yang invalid atau yang tidak lengkap, dan b) kategori kedua pendekatan yang lebih kurang sama dengan definisi-definisi (pertanyaan-pertanyaan, orientasi metode, pengembangan/akuntabilitas, agenda sosial, advokasi.

Pendapat para ahli di atas, mengisyaratkan sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) hal penting yang hendaknya diperhatikan dalam melakukan evaluasi program, yaitu: 1) Pentingnya suatu proses dengan rangkaian rencana yang sistematis; 2) Penetapan standar atau kriteria atau indikator yang jelas dan terukur sebelum dimulainya evaluasi; 3) Pertimbangan dan pengambilan keputusan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara objektif.

Menurut (Arikunto & Jabar, 2008), ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program yaitu: 1) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan; 2) Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi sedikit); 3) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat; 4) Menyebarkan program (melaksanakan program ditempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik, maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu lain.

### **Evaluasi Program Model CIPP**

Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) dikemukakan pertama kali oleh Stufflebeam. Model ini mencakup *evaluasi context, input, process* dan *product*. CIPP merupakan model yang dewasa ini sering digunakan para evaluator pendidikan. Hal ini dikarenakan model ini terbilang objektif dan efektif dalam cara pandanganya terhadap suatu program. (Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, 2007) mengatakan bahwa *The CIPP Model reflects an objectivist orientation. Objectivist evaluations are based on the theory that moral good is objective and independent of personal or merely human feelings*”

CIPP merupakan model evaluasi yang memiliki suatu kerangka kerja komprehensif untuk melakukan evaluasi-evaluasi formatif dan summative atas program-program, proyek-proyek, personil, produksi-produksi, organisasi-organisasi dan sistem-sistem evaluasi. Model ini dimulai pada akhir 1960 untuk membantu meningkatkan dan mencapai akuntabilitas proyek-proyek sekolah di Amerika terutama menjadi kunci untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah. Selama bertahun-tahun, model ini semakin berkembang dimana telah diadaptasi dan diterapkan di Amerika Serikat dan banyak negara lain di dalam dan di luar pendidikan. Bidang aplikasi termasuk pemerintah, filantropi, pembangun-an internasional, militer dan lain-lain.

Model evaluasi ini yang paling banyak dikenal dan ditetapkan oleh para evaluator. CIPP merupakan singkatan dari huruf awal empat buah kata, yaitu: *Context Evaluation* (evaluasi terhadap konteks); *Input Evaluation* (evaluasi terhadap masukan); *Process Evaluation*

(evaluasi terhadap proses); *Product Evaluation* (evaluasi terhadap hasil). Model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem dengan kata lain harus menganalisis program yang berdasarkan komponen-komponennya. Inti dari evaluasi model CIPP adalah evaluasi atas konteks, input, proses, dan produk.

Evaluasi Konteks menilai kebutuhan, masalah, aset, dan kesempatan untuk membantu para pengambil keputusan menentukan tujuan dan prioritas serta hasil. Evaluasi Input menilai pendekatan alternatif, rencana aksi berkompetisi, rencana staf, kelayakan anggaran untuk kelayakan dan potensi efektivitas biaya guna memenuhi kebutuhan dan pencapaian tujuan yang ditargetkan. Para pembuat keputusan menggunakan evaluasi input dalam memilih antara rencana berkompetisi, pembuatan proposal pendanaan, mengalokasikan sumber daya, menugaskan staf, penjadwalan pekerjaan, dan akhirnya membantu orang lain menilai rencana upaya dan anggaran.

Menurut (Wirawan, 2011). Evaluasi proses menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staf dalam melaksanakan kegiatan dan kemudian membantu kelompok yang lebih luas para pengguna program dalam menilai dan menginterpretasikan hasil. Sedangkan, Evaluasi produk mengidentifikasi dan menilai hasil sesuai yang dimaksudkan ataupun tidak disengaja, jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu pengguna fokus pada pencapaian hasil sekaligus mengukur keberhasilan upaya dalam pemenuhan kebutuhan yang ditargetkan. Wirawan, selanjutnya menguraikan model CIPP yang terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu :

a. Evaluasi konteks (*context evaluation*).

Evaluasi konteks untuk menjawab pertanyaan : *What needs to be done?* (Apa yang perlu dilakukan?). Evaluasi ini meng-identifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.

b. Evaluasi masukan (*input evaluation*). Evaluasi masukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan: *How should it be done?* (Bagaimana hal itu harusnya dilakukan?). Evaluasi mengidentifikasi tentang permasalahan, kebutuhan asset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, manfaat program serta menilai pen-dekatan alternative, rencana tindakan, rencana staf, anggaran untuk kelayakan dan potensi *cost effectiveness* sesuai kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih di antara rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber daya, menjadwalkan pekerjaan, menilai rencana-rencana aktivitas dan penganggaran.

- c. Evaluasi proses (*process evaluation*). Evaluasi proses berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan: *Is it being done?* (Apakah program sedang dilaksanakan?). Evaluasi ini berupaya mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktivitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.
- d. Evaluasi produk (*product evaluation*).  
Evaluasi produk diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: *Is it succeeding?* (Apakah program ini berhasil dilaksanakan?). Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang menggunakan teknik analisis studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.”(Sugiyono, 2013). Sumber data pada penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Sebagaimana yang dikatakan Maman: “Sumber data kualitatif adalah tindakan dan perkataan manusia dalam suatu latar yang bersifat alamiah. Sumber data yang lainnya ialah bahan-bahan pustaka, seperti: dokumen, arsip, koran, majalah, jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan dan lain sebagainya (Maman, 2006). Mengenai analisis data, menurut Imam Gunawan, analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mengumpulkan data, dengan cara memilah data yang sesungguhnya penting dan tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data pada upaya menjawab fokus penelitian (Gunawan, 2013).

Analisis kebijakan yang menjadi kajian dalam makalah ini menggunakan Evaluasi kebijakan model CIPP. Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) dikemukakan pertama kali oleh Stufflebeam. Model ini mencakup evaluasi *context, input, process* dan *product*. CIPP merupakan model yang dewasa ini sering digunakan para evaluator pendidikan. Hal ini dikarenakan model ini terbilang objektif dan efektif dalam cara pandanganya terhadap suatu program.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian disadarkan pada studi literature dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan yang membahas salah satu kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan yang menjadi salah satu episode merdeka belajar yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK). Adapun rangkuman uraian nya sebagai berikut :

### **Evaluasi Context Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan**

#### **1. Dasar Hukum Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan**

Beberapa landasan hokum yang melandasi lahirnya Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003).
- b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan.

#### **2. Analisis Tujuan Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan**

Secara umum, program SMK PK bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan rujukan bagi SMK lainnya.

Secara khusus, program SMK PK bertujuan untuk:

- a. Sosialisasi Memperkuat kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah dalam pendampingan Program SMK PK.
- b. Pelatihan Kepala SMK, pengawas sekolah, dan guru SMK Memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK, antara lain kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja.
- c. Pelatihan pendamping program SMK PK Memperkuat kompetensi softskill dan hardskill peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- d. Pembelajaran dan penilaian pada SMK pelaksana program SMK PK Mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah.
  - e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran berstandar dunia kerja Meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital.
  - f. Pemanfaatan platform teknologi Peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar siswa yang berstandar dunia kerja.
  - g. Pelaksanaan pendampingan bagi kepala sekolah dan guru di SMK pelaksana program SMK PK, serta pengawas sekolah Memperkuat kemitraan dan kerja sama antara Kemendikbud dengan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan SMK PK.
3. Hasil Analisis

Secara umum dari hasil evaluasi context bahwa kesiapan pemerintah dalam menjalankan program atau kebijakan SMK Pusat Keunggulan ini cukup baik. Dan SMK sebagai objek dalam kebijakan ini perlu menyiapkan beberapa hal untuk menjalankan kebijakan ini. Serta masih perlu banyak sekali sosialisai dan juga pelatihan bagi kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang nantinya akan menjalankan program SMK Pusat Keunggulan.

### **Evaluasi Input Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan**

#### 1. Evaluasi Kurikulum

Kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan merupakan kurikulum yang baik dan tepat dengan kebutuhan industry saat ini secara keseluruhan desain kurikulum yang di jalankan sudah sangat tepat.

#### 2. Evaluasi Sumber Daya

Sumber daya (sarana & prasaranan) termasuk sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) masih banyak sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang masih belum siap secara sarana ataupun prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan SMK pusat keunggulan, namun pemerintah memberikan pendampingan dalam menyiapkan sumber daya yang memadai. Untuk guru dan tenaga kependidikan dalam proses pelaksanaannya diberikan pelatihan agar menguasai kurikulum SMK PK sesuai dengan tujuan.

#### 3. Hasil Analisis

Secara keseluruhan evaluasi terhadap input dalam mengimplementasikan kurikulum MB SMK PK sudah baik dan dapat dilaksanakan namun dengan beberapa persiapan lagi

yang lebih matang dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan, sekolah dan juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

### **Evaluasi Proses Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan**

Dalam prosesnya implementasi Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan sudah berjalan dengan baik, dan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, namun masih banyak kendala yang di hadapi seperti guru sebagai tenaga pendidikan yang belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang sudah ditentukan.

Hal ini juga dialami oleh (Khusni et al., 2022) dalam penelitiannya bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum diterapkan dalam pembelajaran karena guru masih menjadi pusat pembelajaran dalam proses pembelajaran. Implementasi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila pun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh belum sesuai dengan tahapan implementasi P5 serta belum adanya modul project yang disusun oleh koordinator bersama pendamping P5 yang telah ditunjuk sekolah di awal semester tentang project apa yang harus dilakukan.

Kurangnya koordinasi serta komunikasi sehingga P5 terkesan berjalan sendiri-sendiri sesuai masing-masing koordinator yang telah ditunjuk. Project yang dihasilkan semata-mata hanya untuk kepentingan pameran di akhir semester. Hal ini belum sesuai dengan Panduan Pengembangan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila yaitu tahap pelaksanaannya dimulai dari menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain project penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola project penguatan profil pelajar Pancasila, mengolah asesmen dan melaporkan hasil project penguatan profil pelajar Pancasila, serta evaluasi dan tindak lanjut project penguatan profil pelajar Pancasila.

### **Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan**

Kendala atau tantangan khusus yang dihadapi dari kebijakan SMK Pusat Keunggulan daerah ini antara lain adalah :

1. Orientasi Pada Bantuan: Ada catatan bahwa program ini terlihat lebih berorientasi pada upaya mendapatkan bantuan daripada melakukan perubahan substansial dalam sistem pendidikan. Beberapa pihak meragukan integritas program ini, terutama setelah melihat aktivitas Kepala SMK yang terfokus pada perolehan bantuan.
2. Ketidaksesuaian Antara Persiapan dan Kebutuhan Lapangan Kerja: Tantangan utama dalam pendidikan vokasi adalah ketidaksesuaian antara persiapan sumber daya manusia dengan kebutuhan lapangan kerja. Pertanyaan muncul apakah program SMK PK sudah cukup responsif terhadap dinamika ini.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi yang Tidak Optimal: Koordinasi antara pemerintah daerah dan persiapan sumber daya manusia dari SMK masih terlihat kurang optimal. Contohnya, kurangnya persiapan dalam menyikapi kebutuhan turis asal China di Bali menjadi perhatian khusus.
4. Kekurangan Guru Mata Pelajaran Produktif: Permasalahan utama yang masih dihadapi adalah kekurangan guru mata pelajaran produktif di SMK. Program SMK PK belum sepenuhnya berhasil mengatasi tantangan ini, dengan terlalu banyaknya guru yang lebih fokus pada mata pelajaran normatif.
5. Kurikulum yang Belum Relevan dengan Industri: Perlu adanya perhatian lebih terhadap kurikulum yang masih dianggap belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan industri. Tantangan ini mencakup keterlibatan yang kurang dari pihak industri dalam proses perancangan kurikulum SMK.
6. Tidak Meratanya Penyebaran SMK: Penyebaran SMK yang tidak merata di berbagai daerah berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara lulusan SMK dengan kebutuhan pekerjaan lokal.
7. Afiriasi untuk SMK Terpinggirkan: Pendapat berbeda muncul terkait pemilihan SMK yang dapat mengikuti program SMK PK. Beberapa berpendapat bahwa afiriasi seharusnya lebih ditujukan kepada SMK yang terpinggirkan, yang mungkin memiliki akreditasi rendah, serapan lulusan yang minim, dan fasilitas terbatas.

### **Evaluasi Product Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar SMK Pusat Keunggulan.**

Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) terus menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan mutu lulusannya. Program pengembangan SMK yang diluncurkan pada tahun 2021 ini menjadikan SMK terpilih dapat menjadi rujukan bagi SMK lain khususnya dalam mengembangkan fokus konsentrasi keahlian yang dibutuhkan oleh industri, dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Program SMK Pusat Keunggulan mengusung semangat Merdeka Belajar yang menitikberatkan pada penguatan kompetensi kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. “Program SMK PK juga termasuk penyelarasan sektor pendidikan dengan dunia usaha dan industri, serta keterserapan tamatan SMK pada dunia kerja, baik itu untuk bekerja, berwirausaha, atau pun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Saat ini terdapat 1.852 SMK PK dengan jumlah siswa sebanyak lebih dari 1,9 juta orang. Diharapkan pada tahun 2023 akan mencapai 2.172 SMK dengan total 2,4 juta siswa. Dengan

demikian, diharapkan bisa berdampak semakin besar pada penguatan pendidikan vokasi di berbagai wilayah.

Program SMK Pusat Keunggulan pun memberikan manfaat bagi industri yang menjadi mitra SMK. Program yang dijalankan oleh pemerintah dan industri untuk mendukung SMK juga dinilai semakin sejalan dan selaras. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Timmy Theopelus, Direktur Program Pendidikan Axioo Class. “Melalui program SMK Pusat Keunggulan dan Kurikulum Merdeka, dapat terbentuk sinergi antara SMK dan industri dengan pemerintah sebagai penengahnya. Maka dari itu, pihak industri dan SMK bisa menyiapkan SDM yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan menunjukkan gambaran yang kompleks dan menyeluruh. Sejumlah aspek penting dianalisis untuk memahami keberhasilan, tantangan, serta dampak kebijakan ini. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas:

1. Evaluasi Context (Konteks). Dalam kerangka kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di SMK Pusat Keunggulan, terdapat dasar hukum yang kuat, melibatkan undang-undang nasional, instruksi presiden, dan peraturan menteri pendidikan. Hal ini menciptakan landasan yang kokoh untuk implementasi kebijakan tersebut. Tujuan kurikulum secara umum sejalan dengan aspirasi untuk menghasilkan lulusan yang siap terlibat di dunia kerja atau menjadi wirausaha. Program ini juga dirancang untuk memperkuat kemitraan antara Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK. Analisis konteks menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah dalam menjalankan program SMK Pusat Keunggulan cukup baik. Meskipun demikian, masih diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan agar program ini dapat berjalan dengan optimal.
2. Evaluasi Input (Input). Kurikulum Merdeka Belajar di SMK Pusat Keunggulan dianggap baik dan sesuai dengan kebutuhan industri. Desain kurikulum ini mendapat apresiasi karena mendalam dan sesuai dengan tuntutan zaman. Tantangan muncul terutama dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meskipun pemerintah memberikan pendampingan, masih ada sekolah yang belum sepenuhnya siap secara sarana dan prasarana. Pelatihan juga menjadi kunci untuk memastikan guru dan tenaga kependidikan menguasai kurikulum dengan baik.

3. **Evaluasi Proses (Proses).** Proses implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SMK Pusat Keunggulan berjalan baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Beberapa guru masih belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang sudah ditentukan. Tantangan utama melibatkan koordinasi dan sinkronisasi yang belum optimal, terutama antara pemerintah daerah dan persiapan sumber daya manusia dari SMK. Koordinasi yang kurang baik dapat mempengaruhi hasil dari implementasi kurikulum.
4. **Evaluasi Product (Produk).** Program SMK Pusat Keunggulan menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan mutu lulusan. Program ini berhasil membuat SMK yang terpilih sebagai rujukan bagi SMK lainnya, terutama dalam mengembangkan fokus konsentrasi keahlian yang dibutuhkan oleh industri. Meskipun demikian, beberapa kendala seperti orientasi pada bantuan, ketidaksesuaian antara persiapan dan kebutuhan lapangan kerja, dan kurangnya guru mata pelajaran produktif masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

### **Saran**

Berdasarkan analisis implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan, berikut adalah rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan keberhasilan dan efektivitas program:

1. **Intensifikasi Sosialisasi dan Pelatihan**  
Intensifkan sosialisasi kepada semua pihak terkait, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Selenggarakan pelatihan rutin bagi guru dan tenaga kependidikan agar mereka dapat menguasai kurikulum dengan baik dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar.
2. **Penguatan Kesiapan Sarana dan Prasarana.**  
Dukung sekolah yang belum sepenuhnya siap secara sarana dan prasarana dengan memberikan bantuan dan pendampingan tambahan untuk memastikan keberlanjutan program. Evaluasi secara berkala kebutuhan sekolah dalam hal sumber daya fisik dan teknologi, dan pastikan bahwa dukungan pemerintah sesuai dengan kebutuhan tersebut.
3. **Optimalisasi Koordinasi dan Komunikasi**  
Tingkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan SMK, serta antara SMK dengan dunia industri. Pastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses implementasi dan memberikan kontribusi yang maksimal. Fasilitasi forum atau pertemuan rutin untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pemangku kebijakan, SMK, dan industri.

4. Pengembangan Modul Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Secepatnya susun modul project penguatan profil pelajar Pancasila sesuai panduan yang telah ditetapkan. Pastikan tahapan pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. Tingkatkan koordinasi dan komunikasi antara koordinator dan pendamping project Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk memastikan kelancaran pelaksanaan dan hasil yang maksimal.

5. Evaluasi dan Pembaruan Kurikulum

Lakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum, melibatkan para pemangku kebijakan, guru, dan industri. Sesuaikan kurikulum dengan perkembangan terkini di dunia industri dan kebutuhan pasar kerja. Pastikan partisipasi aktif dari pihak industri dalam perancangan dan evaluasi kurikulum, sehingga kurikulum tetap relevan dengan tuntutan dunia kerja.

6. Penanganan Tantangan Khusus

Perkuat upaya untuk mengatasi kendala-kendala khusus seperti kekurangan guru mata pelajaran produktif, penyebaran SMK yang tidak merata, dan kurangnya persiapan terhadap kebutuhan lapangan kerja lokal. Perhatikan afirmasi untuk SMK yang terpinggirkan, sehingga program SMK Pusat Keunggulan dapat memberikan dampak yang merata di berbagai daerah.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di SMK Pusat Keunggulan dapat lebih efektif dan berdampak positif dalam menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja atau berwirausaha.

## DAFTAR REFERENSI

- Alinawati, M. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 Pada Sekolah Menengah Kejuruan Di Bandung. *Edutech*, 13(3), 343. <https://doi.org/10.17509/edutech.v13i3.3088>
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis, Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield. (2007). *Evaluation, Theory, Models & Applications*. John Wiley & Sons Inc.
- Djaali & Puji Mulyono. (2000). , *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. PPs UNJ.
- Fathansyah. (2019). Perancangan Sistem Penggajian berbasis Web pada CV.Hikari. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Teori*. Bumi Aksara.
- James Mc.David, L. R. L. H. (2005). *Key Concepts and Issues in Program Evaluation and Performance Measurement, Chapter 1*. Sage Publications, Inc.
- Khusni, M. F., Muh Munadi, & Matin, A. (2022). IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DI MIN 1 WONOSOBO. *International Journal of Educational Development*, 12(1), 60–71. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.02.006>
- Kristi D. Menix. (2007). Evaluation of Learning and Program Effectiveness. *The Journal of Continuing Education in Nursing*, 30(5).
- Maman. (2006). *Metedologi Penelitian Agama Teori Dan Praktek*. Raja Grafindo Persada.
- Nafis, F. T. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Rineka Cipta.
- Nurkolis, N., & Muhdi, M. (2020). Keefektivan Kebijakan E-Learning berbasis Sosial Media pada PAUD di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 212. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.535>
- Purnomo, S., Djufri, E., & Khaharsyah, A. (2020). Pendidikan jarak jauh (PJJ) berbasis e-learning edmodo mahasiswa pendidikan vokasional teknik mesin. *Jurnal Taman Vokasi*, 8(2), 73–80. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/tamanvokasi/article/view/9053>
- Purnomo, S., & Triyono, M. B. (2018). Efektifitas Technopreneurship Dengan Model Pembelajaran Cooperative Learning By Technopreneur For SMK Untuk Siswa Di SMK. *Taman Vokasi*, 6(1), 120. <https://doi.org/10.30738/jtvok.v6i1.2972>
- Scriven dalam E. Jane Dividson. (2005). *Evaluation Methodology Basic*. Sage Publication Inc.
- Setiawan, N., & Sofyan, H. (2022). Implementasi kurikulum merdeka belajar di SMK Pusat Keunggulan. *Taman Vokasi*, 10(1), 31–37. <https://doi.org/10.30738/jtvok.v10i1.12114>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Trisnawati, Leni Anggraeni, & Arief Budi Wicaksono. (2019). Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Tingkat SLTA di Kabupaten Pringsewu Menggunakan Model CIPP. *Proceeding of Biology Education*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.21009/pbe.3-1.10>
- Uran, L. L. (2018). Evaluasi implementasi KTSP dan Kurikulum 2013 pada SMK se-Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.21831/pep.v22i1.13309>
- Wirawan. (2011). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Raja Grafindo Persada.